

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara salah satunya adalah penerimaan pajak. Pajak secara umum merupakan pungutan wajib yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pungutan atau iuran wajib tersebut pada akhirnya dapat dirasakan manfaatnya dan digunakan oleh rakyat melalui fasilitas - fasilitas umum yang diberikan oleh negara (Mardiasmo, 2011:1).

Pemungutan pajak bukan merupakan peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah dalam menyeimbangkan perekonomian negara. Menurut sejarah, pemungutan pajak sudah digunakan sebelumnya oleh para raja kepada rakyatnya untuk memelihara kepentingan negara dalam bentuk upeti yang diberikan rakyat secara sukarela. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan bertambah luasnya tugas negara, maka negara membutuhkan dana yang lebih besar untuk memelihara kepentingan negara. Pembayaran pajak yang mulanya diberikan secara sukarela berubah menjadi pungutan wajib yang ditetapkan oleh negara secara sepihak dengan didukung oleh peraturan perundang - undangan, sehingga bersifat memaksa.

Pajak tanpa disadari telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern, karena kegiatan apapun tidak terlepas dari pajak. Untuk memenuhi antusiasme masyarakat dalam hal perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana dalam hal perpajakan memberikan pelayanan yang memadai dalam hal perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak. Didukung dengan teknologi modern, pelayanan perpajakan sekarang dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun secara *online* dengan mengakses *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Pajak yang diterapkan di Indonesia pada umumnya dibagi menjadi pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat akan masuk ke dalam Kas Negara dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak daerah dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah tingkat I (satu) dan pajak daerah tingkat II (dua). Pajak daerah tingkat I (satu) terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak atas bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air, dan pajak rokok.

Sedangkan untuk pajak daerah tingkat II (dua) terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, serta pajak perkotaan dan pedesaan.

Pajak pusat juga terbagi menjadi beberapa jenis pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bagian dari pajak daerah. Dikarenakan adanya perubahan peraturan perpajakan, setelah tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi bagian dari pajak pusat.

Pajak Penghasilan (PPh) terbagi menjadi beberapa jenis pajak diantaranya PPh pasal 21 untuk penghasilan orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, maupun tunjangan lain; PPh pasal 22 untuk penghasilan dari kegiatan transaksi dengan badan - badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun milik swasta dan kegiatan impor; PPh pasal 23 untuk penghasilan atas modal, penyerahan jasa, maupun hadiah atau penghargaan selain yang telah dipungut PPh pasal 21; PPh pasal 25 untuk penghasilan orang pribadi atau badan usaha dengan omzet tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan; PPh pasal 26 untuk penghasilan orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dalam kurun waktu tertentu menurut peraturan perpajakan atau warga negara asing; dan PPh pasal 4 ayat (2) untuk penghasilan yang bersifat final dalam pemungutannya.

Kehidupan modern saat ini membutuhkan sesuatu yang praktis dan efisien untuk urusan pengiriman dokumen maupun paket penting agar dapat menghemat

waktu dan juga tenaga. Oleh karena itu banyak perusahaan yang membuka jasa pengiriman yang menawarkan jasa dengan harga bersaing dan juga pelayanan terbaik untuk berlomba menarik pelanggan sebanyak - banyaknya. Jasa pengiriman bukan merupakan hal baru lagi di kalangan masyarakat mengingat telah adanya Pos Indonesia yang lebih dahulu beroperasi dalam hal layanan pengiriman. Tentunya Pos Indonesia menjadi pelopor dan motivasi bagi orang pribadi maupun badan untuk mendirikan perusahaan jasa pengiriman.

Penyerahan jasa merupakan salah satu obyek pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 seperti yang telah tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang 62 jenis jasa lain yang menjadi obyek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Jasa pengiriman barang termasuk dalam salah satu jenis jasa yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Tentunya dalam setiap kegiatan penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang berlaku di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak yang dipungut oleh orang pribadi maupun badan yang menggunakan jasa di bidang jasa pengiriman. Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas penyerahan jasa secara teori terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Secara teori, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh penerima atau pengguna jasa atas penghasilan jasa yang dibayarkan kepada penyedia jasa, sehingga penyedia jasa hanya menerima bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Berikut data pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa pengiriman pada PT. Telaga Baru Transindo pada bulan Mei 2019.

Tabel 1.1
Data Pemotongan PPh pasal 23

NO.	NAMA CUSTOMER	TOTAL INVOICE (Dalam Rupiah)	TOTAL POTONGAN PPh 23	KETERANGAN
1	ANDRE	420,000	-	
2	ANDRE	60,000	-	
3	ANDRE	60,000	-	
4	ANUGRAH	2,412,000	-	
5	BU MANIK	2,735,000	-	
6	CITO EXPRESS	678,000	-	
7	CV. KARYA MITRA SEJAHTERA	356,000	7,120	
8	CV. KARYA MITRA SEJAHTERA	402,000	8,040	
9	DENI	13,200,000	-	
10	DENI	20,580,000	-	
11	DENI	15,960,000	-	
12	DENI	21,000,000	-	
13	DRAGON	245,000	-	
14	DRAGON	30,000	-	
15	DRAGON	175,000	-	
16	GARDEN CELL	1,015,000	-	
17	GREEN LAND	260,000	-	
18	INDOBISMAR	2,700,000	-	
19	INDOBISMAR	4,050,000	-	
20	JAGOAN	110,000	-	
21	JAGOAN	1,875,000	-	
22	JAGOAN	252,500	-	
23	JAVA	365,000	-	
24	KLIK LOGISTIK	750,000	-	
25	KLIK LOGISTIK	915,500	-	
26	MAC CARGO	1,920,000	-	
27	PT. BHANDA GHARA REKSA	5,044,500	-	
28	PT. DATA SCRIP	3,190,000	63,800	TANPA BUKTI POTONG
29	PT. GASTIASIH CARAKA	14,422,000	-	
30	PT. GASTIASIH CARAKA	25,051,000	-	
31	PT. GASTIASIH CARAKA	448,000	-	
32	PT. GASTIASIH CARAKA	24,552,000	-	
33	PT. GASTIASIH CARAKA	23,357,000	-	
34	PT. GLOBAL MITRA SEJAHTERA	2,070,000	-	
35	PT. GLOBAL MITRA SEJAHTERA	180,000	-	
36	PT. ICOOL INTERNATIONAL INDONESIA	1,335,000	-	
37	PT. SCC / LAVA	4,520,000	-	
38	PT. SENTOSA UNGGUL ABADI	28,320,000	566,400	
39	PT. SENTOSA UNGGUL ABADI	26,810,000	536,200	
40	PT. SENTRA WORLD INDONESIA	384,500	-	
41	PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI	5,465,000	109,300	TANPA BUKTI POTONG
42	PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI	4,775,000	95,500	TANPA BUKTI POTONG
43	PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI	6,285,000	125,700	TANPA BUKTI POTONG
44	SCM	130,000	-	
45	TERADATA	410,000	-	
46	TRIADHIPA	6,650,000	-	
47	TRIADHIPA	6,790,000	-	
48	TRIADHIPA	6,480,000	-	
49	TRIADHIPA	2,525,000	-	
50	TRICOR	4,837,500	-	
51	TRICOR	4,609,500	-	
52	TRICOR	2,532,500	-	
53	TRICOR	11,367,500	-	
54	XELO EXPRESS	3,218,000	-	
TOTAL		318,285,000	1,512,060	

Sumber: Admin Penagihan PT. Telaga Baru Transindo tahun 2019

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada kondisi yang sebenarnya di PT. Telaga Baru Transindo dapat dilihat pada Tabel 1.1 di atas, tidak semua pengguna jasa pengiriman membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 kepada penyedia jasa atau bahkan tidak dilakukan pemungutan pajak oleh pengguna jasa sehingga penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 kurang maksimal bagi jasa pengiriman milik PT. Telaga Baru Transindo. Kurang maksimal yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak semua pengguna jasa pengiriman PT. Telaga Baru Transindo menerapkan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa yang digunakan dan dari empat pelanggan yang melakukan pemungutan pajak hanya dua pelanggan yang mengirimkan bukti potong atas dipungutnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Tanpa adanya bukti potong juga dapat menimbulkan pertanyaan apakah pajak yang dipungut atas jasa pengiriman PT. Telaga Baru Transindo telah disetorkan dan dibayarkan oleh pemotong. Sesuai dengan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul Tugas Akhir “Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Barang pada PT. Telaga Baru Transindo”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan dari studi lapang ini selain sebagai tolak ukur atas teori yang penulis pelajari dan menjelaskan tentang penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT. Telaga Baru Transindo, juga sebagai persyaratan dalam mencapai gelar ahli madya sekaligus telah menyelesaikan

program pendidikan diploma tiga Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat yang diharapkan dari hasil studi lapang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Telaga Baru Transindo, hasil dari studi lapang ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 bagi perusahaan di masa mendatang.
2. Bagi penulis, hasil dari studi lapang ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu dalam menerapkan teori yang diterima dengan kondisi sesungguhnya pada lapangan, khususnya dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 dalam bidang jasa pengiriman.
3. Bagi Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, hasil dari studi lapang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang akademik mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pengiriman, sehingga dapat menjadi referensi dalam penulisan selanjutnya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis mengambil PT. Telaga Baru Transindo sebagai ruang lingkup dalam mengerjakan Laporan Tugas Akhir agar lebih terarah dan khususnya untuk mendalami penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada perusahaan yang bersangkutan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk memperoleh informasi awal mengenai obyek penelitian, kemudian mendatangi tempat yang dijadikan obyek penelitian secara langsung untuk memastikan topik yang diangkat relevan dengan perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT. Telaga Baru Transindo.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan konsultan pajak yang dipakai jasanya oleh perusahaan untuk mengetahui tentang obyek yang diteliti seputar penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT. Telaga Baru Transindo.

3. Dokumentasi

Hasil wawancara yang didukung dengan bukti - bukti secara dokumentasi dapat mendukung kredibilitas penulisan ini. Dokumentasi untuk penulisan ini berupa data - data bukti transaksi dengan pengguna jasa pengiriman dan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas penyerahan jasa.